

**PENGARUH GOOD GOVERNANCE, AUDIT KINERJA, DAN LAPORAN KEUANGAN
TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada OPD Kota Surabaya)**

Novia Lewerissa

novialewerissa24@gmail.com

Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of Good Governance, Audit performance, Financial Statements against Local Government Financial Accountability with case studies at the Organization of Regional Devices (OPD) Surabaya. This research is a quantitative research. Methods of data collection by survey method. The data used is the primary data through the distribution of questionnaires to respondents OPD employee of Surabaya. Sampling method using purposive sampling method. The number of samples in this research were 56 respondents. Meanwhile, the analysis technique used in this research using multiple linear regression analysis with SPSS application tools (Statistical Product and Services Solutions). The results of this research indicates that the Good Governance has a positive and significant effect on Financial Accountability with test results have a significance value of 0.005, Audit Performance has a positive and significant effect on Financial Accountability with test results have a significance value of 0,014 and Financial Statements has a positive and significant effect on Financial Accountability with test results have a significance value of 0,000. The results of this research have supported all the hypotheses that have been formulated in this research.

Keywords: good governance, performance audits, financial statements, financial accountability.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Good Governance*, Audit Kinerja, Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah dengan studi kasus pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data dengan metode survei. Data yang digunakan adalah data primer melalui penyebaran kuesioner kepada responden pegawai OPD Kota Surabaya. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 56 responden. Sedangkan, teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS (*Statistical Product and Services Solutions*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan dengan hasil pengujian memiliki nilai signifikansi 0,005, audit kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan dengan hasil pengujian memiliki nilai signifikansi 0,014 dan laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan dengan hasil pengujian memiliki nilai signifikansi 0,000. Hasil penelitian ini telah mendukung semua hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

Kata Kunci: *Good Governance*, Audit Kinerja, Laporan Keuangan, Akuntabilitas Keuangan.

PENDAHULUAN

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai pemerintah telah bekerja dengan

ekonomis, efisien, dan efektif atau belum. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional, dan perspektif sistem akuntabilitas.

Bersatu dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau amanah (*good governance*) yang merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Pengertian *good governance* menurut Mardiasmo (2002) adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintah yang baik.

Mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel menuntut pemerintah menyusun serta menyajikan laporan keuangan publiknya sesuai pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dalam SAP No. 01 menyebutkan bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan serta untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan dari pemerintah. Semua informasi tersebut digunakan oleh pihak yang terkait dengan laporan keuangan dari pemerintah ini merupakan pertanggungjawaban dari pemerintah terhadap masyarakatnya sebagai sumber dana. Tujuan-tujuan itulah yang menyebabkan diperlukannya sebuah standar yang paling tidak harus dimiliki oleh laporan yang dibuat pemerintah, standar ini juga memuat pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan, persyaratan minimum yang harus dipenuhi laporan keuangan pemerintah paling tidak adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Hal tersebut disebabkan karena organisasi sektor publik merupakan organisasi yang menggunakan sumber dana publik sehingga harus memberikan pertanggungjawaban melalui laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik dari laporan keuangan.

Penetapan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 oleh pemerintah, mengenai Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berimplikasi pada tuntutan otonomi yang lebih luas dan akuntabilitas publik yang nyata yang harus diberikan kepada pemerintah daerah (Halim, 2001). Selanjutnya, Undang-Undang ini diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004. Kedua undang-undang tersebut telah merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horisontal (kepada masyarakat melalui DPRD).

Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami (Schiavo-Campo dan Tomasi, 1999). Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya (IMF, 1998 dalam Schiavo-Campo dan Tomasi, 1999).

Peraturan Pemerintah no. 105 tahun 2000 menyebutkan secara tegas bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan harus disajikan sesuai dengan standar akuntansi. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah dimatikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU no. 17 tahun 2003 dan UU no. 32 tahun 2004. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan standar yang harus diikuti dalam laporan keuangan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengguna laporan keuangan akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna dan auditor (BPK). SAP ditetapkan dengan PP no. 71 tahun 2010. Laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban keuangan daerah dan merupakan tanggungjawab atas akuntabilitas

publik serta merupakan salah satu ukuran keberhasilan (kinerja) pemerintah daerah (Sinaga, 2005).

TINJAUAN TEORITIS

Good Governance

Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. (Sumodiningrat, 1999: 251) menyatakan *good governance* adalah upaya pemerintahan yang amanah dan untuk menciptakan *good governance* pemerintahan perlu didesentralisasi dan sejalan dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Penerapan *Good Governance* bersatu bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau amanah (*good governance*) yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilakukan berbagai upaya yaitu dengan ditetapkannya Undang-undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Good governance dapat diartikan sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem pengadilan yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggung jawab (*accountable*) pada publiknya. *Good governance* adalah, penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain (*state, private sector and society*). Tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan lainnya dalam mewujudkan *good governance* adalah sebagai berikut: (1) Transparansi, yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintah, lingkungan, ekonomi dan sosial. Partisipasi, yaitu penerapan pengambilan keputusan yang demokratis serta pengakuan atas HAM, kebebasan pers dan kebebasan mengemukakan pendapat atau aspirasi masyarakat. (2) Akuntabilitas, yaitu kewajiban melaporkan dan menjawab dari yang dititipi amanah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan maupun kegagalan kepada penitip amanah sampai yang memberi amanah puas dan bila belum ada atau tidak puas dapat kena sanksi.

Pengertian *good governance* menurut (Mardiasmo, 2002) adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintah yang baik. Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendefinisikan *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Audit Kinerja

Audit kinerja merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif pada kinerja sektor publik atas ekonomi dan efisiensi suatu program, efektifitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan, fungsi yang melakukan aktifitas dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut (Harun dan Suratno, 2009).

Audit kinerja dapat dilaksanakan oleh external auditor maupun internal auditor. Sesuai amanat UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara memberikan mandat dan kewenangan kepada BPK - sebagai lembaga pemeriksa eksternal - untuk melaksanakan audit kinerja. Di sisi lain, PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah juga memberikan kewenangan pada Aparat Pengawas Intern Pemerintah untuk melaksanakan audit kinerja, sebagai suatu bentuk pengawasan. Dengan demikian, auditor eksternal dan auditor internal perlu berkoordinasi dalam melaksanakan audit kinerja. Jangan sampai terjadi *overlapping*. Keduanya harus

menjaga hubungan dan komunikasi yang harmonis agar tercipta konfigurasi audit kinerja yang baik.

Audit kinerja merupakan metamorfosis dari audit intern (*internal audit*) yang kemudian berkembang menjadi audit operasional (*operational audit*) dan selanjutnya menjadi audit manajemen (*management audit*). Audit kinerja merupakan salah satu jenis audit yang dilakukan sebagai pengembangan diri audit keuangan. Audit kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja suatu Kementerian/Lembaga Pemerintah, untuk memastikan sesuai atau tidaknya sasaran yang kegiatan yang menggunakan anggaran. Oleh karena audit kinerja (*performance audit*) merupakan perluasan dari audit keuangan yang meliputi : ekonomi, efisien dan efektifitas, maka auditor yang akan melaksanakan kegiatan harus memperoleh informasi tentang organisasi, meliputi struktur organisasi, prosedur kerja dan sistem informasi dan pelaporan keuangan dan kegiatan kepada manajemen.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan di dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. Laporan keuangan bagi pihak manajemen perusahaan berfungsi sebagai laporan pertanggung jawaban keuangan pada pemilik modal. Bagi pemilik modal, laporan keuangan berfungsi untuk mengevaluasi kinerja manajer perusahaan selama satu periode. Dengan adanya laporan keuangan ini, manajer perusahaan akan bekerja semaksimal mungkin agar kinerjanya dinilai baik. Pada akhir periode, perusahaan akan membuat laporan keuangan. Akhir periode bisa tiap akhir bulan atau tiap akhir tahun.

Laporan keuangan untuk disampaikan kepada pihak luar perusahaan umumnya dibuat tiap akhir tahun. Pihak luar perusahaan antara lain: (1) Investor. (2) Karyawan. (3) Pemberi Pinjaman. (4) Pemasok dan Kreditor usaha lainnya. (5) Pelanggan. (6) Pemerintah. (7) Masyarakat. Laporan keuangan memuat informasi yang bersifat keuangan seperti jumlah aktiva, jumlah kewajiban, jumlah modal, jumlah pendapatan, jumlah biaya dan arus kas. Informasi yang bersifat keuangan diambil dari ringkasan transaksi yang terjadi selama satu periode. Laporan keuangan adalah suatu laporan yang berguna untuk menyampaikan informasi keuangan yang dapat dipercaya kepada pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan memuat beberapa hal, diantaranya harta, utang, modal, dan semua pendapatan yang diperoleh serta beban-beban yang dikeluarkan perusahaan pada periode tertentu dalam rangka untuk mendapatkan laba atau keuntungan.

Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok perwujudan *good governance* yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional dan perspektif sistem akuntabilitas (Sadjiarto, 2000). Dalam penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya. Syahrudin (2003), mengemukakan salah satu akuntabilitas publik adalah akuntabilitas *financial* (keuangan) dimana mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja *financial* organisasi kepada pihak luar.

Pemerintah daerah melaksanakan amanah dari masyarakat dalam bentuk pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk dapat transparan dan akuntabel dalam pertanggungjawabannya. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami (Schiavo-Campo dan

Tamosi, 1999). Salah satu akuntabilitas yang penting berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah adalah akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas keuangan ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan ke-uangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

Akuntabilitas keuangan terkait dengan penghindaran penyalahgunaan dana publik (Mardiasmo, 2002:21). Tahap-tahap dalam Akuntabilitas keuangan, mulai dari perumusan rencana keuangan (proses penganggaran), pelaksanaan dan pem-biayaan kegiatan, evaluasi atas kinerja keuangan, dan pelaksanaan pelaporannya. Dengan kata lain akuntabilitas terkandung kewajiban menyajikan dan melaporkan pengelolaan keuangan daerah kedalam laporan keuangan daerah. Laporan keuangan salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik. Laporan keuangan pemerintah daerah disajikan secara komprehensif (Mardiasmo, 2002:36).

Pengaruh *Good Governance* Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah

Good governance dapat diartikan sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem pengadilan yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggung jawab (*accountable*) pada publiknya. *Good governance* adalah, penyelenggaraan pemerin-tahan yang solid dan bertanggungjawab serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergiaan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain (*state, private sector and society*). Penerapan *Good Governance*, menuntut pemerintah untuk dapat memberikan informasi yang didasarkan pada prinsip transparansi, bertanggungjawab, partisipasi, keadilan, kemandirian, mudah dipahami dan sebenar-benarnya (Cadbury Committee, 1992). Pengaruh penerapan *good governance* terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah dibuktikan oleh hasil penelitian Elvira (2011) dan Azlim *et al.*, (2012) yaitu penerapan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah. Berdasarkan paparan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: *Good governance* berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan.

Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah

Hubungan dilakukannya audit kinerja terutama dibagian yang langsung terkait dengan penegelolaan keuangan dengan kualitas pelaporan dari laporan keuangan daerah akan sangat besar. Pengaruh tersebut terkait dengan audit kinerja yang minitikberatkan kepada pemeriksaan tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian yang menggambarkan kinerja dari pegawai yang terkait dengan pengelolaan laporan keuangan mulai dari penganggaran, penggunaan, sampai dengan penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban dari pemerintah atas dana masyarakat yang dikelolanya. Pengaruh audit kinerja terhadap akuntabilitas keuangan dibuktikan oleh hasil penelitian Chandra dan Maestro (2013) yaitu audit kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Berdasarkan paparan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Audit kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan

Pengaruh Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah

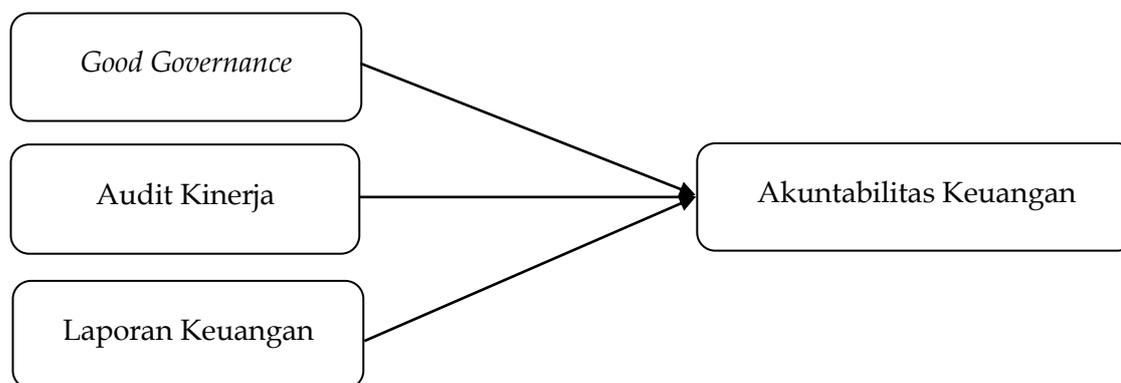
Laporan keuangan pada pemerintah sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan karena standar yang harus dipenuhi oleh sebuah laporan keuangan adalah relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat diperbandingkan. Selain itu hal yang juga harus diperhatikan dalam penyusunan laporan keuangan adalah mengandung kejujuran artinya informasi yang terdapat pada laporan keuangan pemerintah sebagai pertanggungjawaban pemerintah yang mengelola dana masyarakat berisi informasi yang sebenar-benarnya. Pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas laporan keuangan

pemerintah dibuktikan oleh hasil penelitian Elvira (2011), Azlim *et al.*, (2012), dan Wiraputra *et al.*, (2014) yaitu standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah. Berdasarkan paparan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan

Model Penelitian

Model Penelitian dalam penelitian ini adalah:



Gambar 1
Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Obyek) Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif (*causal-comparative research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat serta pengaruh antara dua variabel atau lebih. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang menekankan pada pengujian hipotesis, mengukur variabel menggunakan angka, dan menganalisis data menggunakan statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya dengan jumlah populasi sebanyak 29 OPD.

Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini mengambil populasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Surabaya, jumlah OPD Kota Surabaya adalah 63 OPD yang terdiri dari Sekretariat Daerah, 22 Dinas, 5 Lembaga Teknik/Badan/Bagian, Inspektorat, RSUD Dr. Mohammad Soewandhie, RSUD Bhakti Dharma Husada, Satuan Polisi Pamong Praja dan 31 Kecamatan. Dalam pengambilan sampel, teknik yang digunakan adalah teknik "*purposive sampling*" yang berarti bahwa pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Berikut kriteria sampel yang telah ditentukan oleh peneliti: (1) Berdasarkan pertimbangan terkait dalam penyusunan laporan keuangan di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. (2) Dinas/Badan yang terdaftar dalam www.surabaya.go.id. (3) Kepala Dinas/Badan/Bagian di OPD Kota Surabaya. (4) Bekerja di lingkungan Pemda Kota Surabaya lebih dari lima tahun

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek merupakan jenis data penelitian berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian. Data subjek dalam penelitian ini diperoleh dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden

yang menjadi sasaran penelitian yang berisikan daftar pertanyaan terstruktur yang ditujukan kepada responden.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan cara metode survei yang dimana metode pengumpulan data yang menggunakan kuesioner. Metode survei merupakan cara pengumpulan data di mana peneliti atau pengumpul data mengajukan pertanyaan kepada responden baik dalam bentuk lisan maupun secara tertulis (Sanusi, 2014:105). Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2014:199).

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel independen dalam penelitian ini adalah *good governance*, audit kinerja dan laporan keuangan, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas keuangan.

Good governance adalah upaya pemerintahan yang amanah dan untuk menciptakan *good governance* pemerintahan perlu didesentralisasi dan sejalan dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mengukur variabel ini menggunakan *skala likert*. Terdapat 8 indikator yang mempengaruhi *good governance* yaitu: (1) Partisipasi Masyarakat. (2) Aturan Hukum (*Rule Law*). (3) Transparansi. (4) Berorientasi Konsensus. (5) Kesetaraan. (6) Efektifitas dan Efisiensi. (7) Akuntabilitas. (8) Visi Strategi.

Audit kinerja merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif pada kinerja sektor publik atas ekonomi dan efisiensi suatu program, efektifitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan, fungsi yang melakukan aktifitas dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut. Terdapat 2 indikator yang mempengaruhi audit kinerja yaitu: (1) Audit Program (Audit Efektivitas). (2) Audit Ekonomi dan Efisiensi (*Management and Operational Audit*)

Laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan di dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. Terdapat 8 indikator yang mempengaruhi laporan keuangan, yaitu: (1) Analisis Surplus/Defisit APBD. (2) Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF). (3) Derajat Otonomi Fiskal (DOF). (4) Upaya Fiskal/Posisi Fiskal. (5) Analisis Efektivitas (CLR). (6) Indeks Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah. (7) Rasio Kemandirian Daerah. (8) Kemampuan Pinjaman Daerah (DSCR).

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner dengan *skala likert*. Terdapat 5 indikator yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan yaitu: (1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran. (2) Akuntabilitas Manajerial. (3) Akuntabilitas Program. (4) Akuntabilitas Kebijakan. (5) Akuntabilitas Fiskal.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode analisis yang dimana perhitungannya menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 16 yang bertujuan untuk menentukan pengaruh *Good Governance*, Audit kinerja dan Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen atau pernyataan yang ada di kuesioner. Suatu instrumen atau pernyataan yang valid mempunyai validitas yang tinggi. Pengujian validitas menggunakan ketentuan jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada taraf signifikan 5% maka pertanyaan kuesioner tersebut dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana jawaban dari kuesioner tersebut memiliki kesamaan atau konsistensi yang digunakan pada waktu yang berbeda. Pengukuran reliabilitas penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien *cronbach's alpha*. Menurut Ghazali (2006:42) menyatakan bahwa jika nilai koefisien *alpha* lebih besar dari 0,60 maka disimpulkan bahwa konstruk atau variabel penelitian tersebut dapat dikatakan handal dan reliabel.

Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah *Good Governance*, audit kinerja dan laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda yang digunakan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Tes statistik regresi berganda dengan menggunakan model sebagai berikut :

$$AK = \alpha + \beta_1 GG + \beta_2 AU + \beta_3 LK + \varepsilon$$

Dimana :

AK	: Akuntabilitas Keuangan
α	: Konstanta
GG	: <i>Good Governance</i>
AU	: Audit Kinerja
LK	: Laporan Keuangan
$\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien Regresi
ε	: <i>Error</i>

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen, variabel dependen atau keduanya terdistribusi (sebarannya) normal atau tidak normal Ghazali (2006: 147). Data dikatakan baik apabila mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan uji statistik menggunakan *non-parametrik kolmogorov-smirnov (1-sample K-S)*. Jika hasil *kolmogorov-smirnov* menunjukkan nilai signifikan di atas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal.

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas atau independen dalam model regresi (Ghozali, 2006: 41). Jika terjadi korelasi, berarti terjadi masalah multikolinearitas. Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolinearitas, penelitian ini menggunakan teknik *Variance Inflation Factor (VIF)* dan nilai *tolerance* dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Bila $VIF < 10$ maka tidak terdapat masalah multikolinearitas, bila $VIF \geq 10$ maka terdapat masalah multikolinearitas. (b) Bila nilai *tolerance* $> 0,1$ maka tidak terdapat masalah multikolinearitas, bila nilai *tolerance* $\leq 0,1$ maka terdapat masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi tidak memiliki varians yang konstan dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain konstan disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang

baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Deteksi adanya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara *studentized residual* (SRESID) dan *standardized predicted value* (ZPRED) , dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual dari (Y prediksi - Y sesungguhnya) yang telah di-*standardized*. Dasar pengambilan keputusan dengan ketentuan sebagai berikut (Ghozali, 2006: 105): (a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas. (b) Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Koefisien Determinasi (R_2)

Koefisien determinasi (R_2) digunakan untuk mencari seberapa besar variasi variabel independen dapat menjelaskan secara keseluruhan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap naik turunnya variasi nilai variabel dependen. Nilai koefisien determinasi R_2 menunjukkan besarnya variabel-variabel independent dalam mempengaruhi variabel dependent. Nilai R_2 berkisar antara 0 dan 1 ($0 \leq R_2 \leq 1$). Semakin besar nilai R_2 , maka semakin besar variasi variabel dependent yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independent. Sebaliknya, makin kecil nilai R_2 , maka semakin kecil variasi variabel dependent yang dapat di jelaskan oleh variasi variabel independent.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji Kelayakan Modal (Uji Statistik F) digunakan untuk menguji apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$) (Ghozali, 2011). Ketentuan penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut : (1) Jika nilai signifikansi $F > 0,05$ atau $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Berarti bahwa secara bersama-sama seluruh variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. (2) Jika nilai signifikansi $F \leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Uji t

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Cara melakukan uji t adalah dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$) (Ghozali, 2011). Ketentuan penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut : (1) Jika nilai signifikansi $t > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. (2) Jika nilai signifikansi $t \leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Pengujian validitas instrumen dengan bantuan perangkat lunak SPSS, nilai validitas dapat dilihat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation*. Jika angka korelasi yang diperoleh lebih besar daripada angka kritik ($r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$) maka instrumen tersebut dikatakan valid. Pengujian kualitas data dilakukan dengan sampel uji coba sebanyak 56 orang. Angka kritik pada penelitian ini adalah $N-2 = 56-2 = 54$ dengan taraf signifikan $\alpha = 5\%$, maka $r \text{ tabel}$

untuk angka kritik dalam penelitian ini adalah 0,2632. Berikut ini adalah uji validitas dengan program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	Pearson Correlation	Sig.	Keterangan
<i>Good governance</i>	X _{1.1}	0,796	0,2632	Valid
	X _{1.2}	0,776	0,2632	Valid
	X _{1.3}	0,785	0,2632	Valid
	X _{1.4}	0,789	0,2632	Valid
	X _{1.5}	0,764	0,2632	Valid
	X _{1.6}	0,845	0,2632	Valid
	X _{1.7}	0,813	0,2632	Valid
	X _{1.8}	0,694	0,2632	Valid
	X _{1.9}	0,780	0,2632	Valid
	X _{1.10}	0,763	0,2632	Valid
	X _{1.11}	0,764	0,2632	Valid
	X _{1.12}	0,841	0,2632	Valid
	X _{1.13}	0,789	0,2632	Valid
	X _{1.14}	0,696	0,2632	Valid
	X _{1.15}	0,779	0,2632	Valid
Audit kinerja	X _{2.1}	0,438	0,2632	Valid
	X _{2.2}	0,715	0,2632	Valid
	X _{2.3}	0,576	0,2632	Valid
	X _{2.4}	0,771	0,2632	Valid
	X _{2.5}	0,741	0,2632	Valid
	X _{2.6}	0,565	0,2632	Valid
	X _{2.7}	0,705	0,2632	Valid
	X _{2.8}	0,683	0,2632	Valid
	X _{2.9}	0,581	0,2632	Valid
	X _{2.10}	0,565	0,2632	Valid
	X _{2.11}	0,726	0,2632	Valid
	X _{2.12}	0,726	0,2632	Valid
	X _{2.13}	0,491	0,2632	Valid
	X _{2.14}	0,777	0,2632	Valid
	X _{2.15}	0,683	0,2632	Valid
Laporan keuangan	X _{3.1}	0,723	0,2632	Valid
	X _{3.2}	0,800	0,2632	Valid
	X _{3.3}	0,659	0,2632	Valid
	X _{3.4}	0,818	0,2632	Valid
	X _{3.5}	0,742	0,2632	Valid
	X _{3.6}	0,816	0,2632	Valid
	X _{3.7}	0,793	0,2632	Valid
	X _{3.8}	0,639	0,2632	Valid
	X _{3.9}	0,618	0,2632	Valid
Akuntabilitas keuangan	Y ₁	0,729	0,2632	Valid
	Y ₂	0,762	0,2632	Valid
	Y ₃	0,699	0,2632	Valid
	Y ₄	0,758	0,2632	Valid
	Y ₅	0,525	0,2632	Valid
	Y ₆	0,821	0,2632	Valid

Sumber: data primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan item pernyataan dari masing-masing variabel dapat dikatakan valid, karena mempunyai nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} ($r_{hitung} > 0,2632$).

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi dari instrumen penelitian. Suatu instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* berada diatas 0,6. Tabel 11 menunjukkan hasil uji reliabilitas untuk empat variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Good Governance (X1)	0,951	Reliabel
Audit kinerja (X2)	0,903	Reliabel
Laporan keuangan (X3)	0,889	Reliabel
Akuntabilitas keuangan (Y)	0,807	Reliabel

Sumber: data primer diolah, 2018

Tabel 2 menunjukkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

Analisis Regresi Linier Berganda

Perhitungan regresi linier berganda antara *Good Governance*, audit kinerja, dan laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan dengan dibantu program SPSS 16 dalam proses perhitungannya dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3
Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	t	Sig
	B		
Konstanta	-0,265	-	-
Good Governance (X1)	0,318	2,918	0,005
Audit kinerja (X2)	0,300	2,556	0,014
Laporan keuangan (X3)	0,423	4,295	0,000

Sumber: data primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel 3, maka penjelasan akuntabilitas keuangan dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = -0,265 + 0,318X_1 + 0,300X_2 + 0,423X_3 + e$$

Hasil persamaan regresi linier berganda tersebut diatas memberikan pengertian bahwa: (1) β_1 (nilai koefisien regresi *Good Governance*) bernilai positif, mempunyai arti apabila *Good Governance* semakin meningkat, maka akuntabilitas keuangan yang dihasilkan semakin meningkat. (2) β_2 (nilai koefisien regresi audit kinerja) bernilai positif, mempunyai arti apabila audit kinerja semakin meningkat, maka akuntabilitas keuangan yang dihasilkan semakin meningkat. (3) β_3 (nilai koefisien regresi laporan keuangan) bernilai positif, mempunyai arti apabila laporan keuangan semakin meningkat, maka akuntabilitas keuangan yang dihasilkan semakin meningkat.

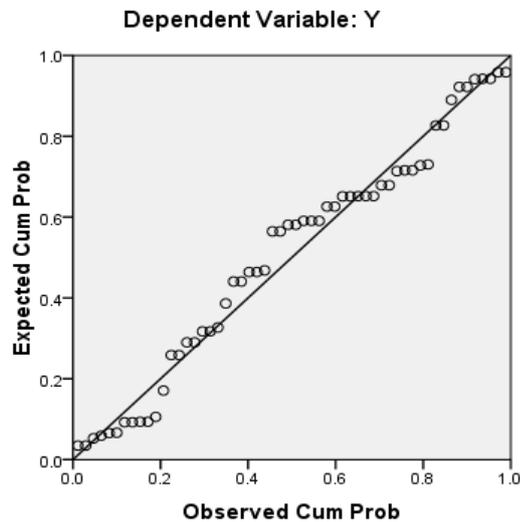
Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Data

berdistribusi normal, jika penyebaran plot berada disepanjang garis 45°. Hasil normalitas adalah sebagai berikut. Uji normalitas data dapat dilihat dari penyebaran data yang mengikuti garis normal seperti yang dapat dilihat pada gambar 2:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: data primer diolah, 2018

Gambar 2
Uji Normalitas

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual	Keterangan
Kolmogorov-Smirnov Z	0,898	
Asymp. Signifikansi	0,396	Normal

Sumber: data primer diolah, 2018

Hasil grafik plot normal dapat diketahui berada di sepanjang garis 45°, sedangkan berdasarkan tabel 4 hasil uji normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* yaitu nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* pada *Asymp. Signifikansi* lebih besar dari 5% (0,05) yaitu sebesar 0,396 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal, sehingga dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Multikolinearitas

Bertujuan untuk mendeteksi adanya problem multikolinearitas, maka dapat dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Berikut ini merupakan hasil pengujian multikolinearitas pada tabel 5:

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinieritas

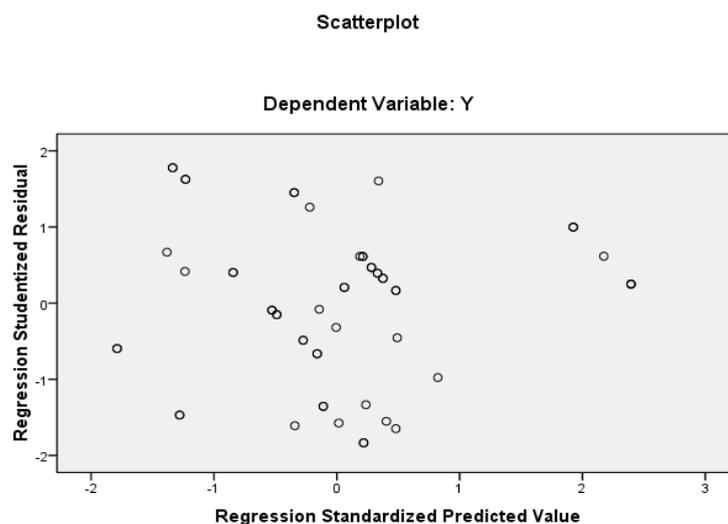
Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Good Governance (X_1)	0,476	2,100	Non Multikolinieritas
Audit kinerja (X_2)	0,693	1,443	Non Multikolinieritas
Laporan keuangan (X_3)	0,529	1,891	Non Multikolinieritas

Sumber: data primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel 5 diatas terlihat bahwa nilai *tolerance* mendekati angka 1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) lebih rendah dari 10 untuk setiap variabel, maka hal ini berarti dalam persamaan regresi tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau bebas multikolinieritas, sehingga seluruh variabel independen (X) tersebut dapat digunakan dalam penelitian

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan jika *variance* berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil heteroskedastisitas dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: data primer diolah, 2018

Gambar 3
Gambar Scatterplot

Berdasarkan gambar 3 grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa data tersebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model persamaan regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi akuntabilitas keuangan berdasarkan variabel-variabel yang mempengaruhinya yaitu *Good Governance*, audit kinerja dan laporan keuangan. Setelah dilakukan uji asumsi klasik tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi linier dalam penelitian ini, bebas dari asumsi dasar (klasik) tersebut, sehingga pengambilan keputusan melalui uji F dan

uji t yang akan dilakukan dalam penelitian ini tidak akan bias atau sesuai dengan tujuan penelitian.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah *Good Governance*, audit kinerja, dan laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Hasil pengujian ini dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6
Hasil Uji F

F hitung	Signifkansi	Keterangan
42,220	0,000	Berpengaruh

Sumber: data primer diolah, 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} dengan tingkat signifikansi 0,000 (di bawah 0,05) sebesar 42,220. Berdasarkan tingkat signifikansinya, maka disimpulkan H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti variabel independen yang terdiri dari *Good Governance*, audit kinerja, dan laporan keuangan secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependennya yaitu akuntabilitas keuangan (Y).

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Dari uji determinasi dihasilkan nilai R^2 sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7
Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.842 ^a	.709	.692	.28049

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: data primer diolah, 2018

Hasil uji koefisien Determinasi dan koefisien korelasi berganda menunjukkan nilai R sebesar 0,842. Hal ini berarti bahwa hubungan atau korelasi antara faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan adalah kuat karena $> 0,50$. Nilai *R Square* sebesar 0,709 atau 70,9%, ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas keuangan yang dapat dijelaskan variabel *Good Governance*, audit kinerja, dan laporan keuangan adalah sebesar 70,9%, sedangkan sisanya 29,1% dijelaskan faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini.

Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk mengetahui variabel bebas secara parsial atau individu mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Ghozali, 2011). Hasil pengujian hipotesis secara parsial dengan menggunakan SPSS 16 didapat hasil uji t seperti yang tersaji pada tabel 8 berikut:

Tabel 8
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients B	t	Sig
Konstanta	-0,265	-	-
Good Governance (X1)	0,318	2,918	0,005
Audit kinerja (X2)	0,300	2,556	0,014
Laporan keuangan (X3)	0,423	4,295	0,000

Sumber: data primer diolah, 2018

Berdasarkan perhitungan hasil uji t yang tercantum pada tabel 8, maka hasilnya memberikan pengertian bahwa: (1) Diperoleh nilai koefisien regresi bernilai positif dan nilai signifikansi untuk *Good Governance* adalah $\alpha = 0,005 < 0,05$ menandakan bahwa *Good Governance* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Sehingga H_1 yang menyatakan adanya pengaruh *Good Governance* terhadap akuntabilitas keuangan diterima. (2) Diperoleh nilai koefisien regresi bernilai positif dan nilai signifikansi untuk audit kinerja adalah $\alpha = 0,014 < 0,05$ menandakan bahwa audit kinerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Sehingga H_2 yang menyatakan adanya pengaruh audit kinerja terhadap akuntabilitas keuangan diterima. (3) diperoleh nilai koefisien regresi bernilai positif dan nilai signifikansi untuk laporan keuangan adalah $\alpha = 0,000 < 0,05$ menandakan bahwa laporan keuangan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Sehingga H_3 yang menyatakan adanya pengaruh laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan diterima.

Pembahasan

Pengaruh *Good Governance* Terhadap Akuntabilitas keuangan

Good Governance mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05. Sehingga hal ini berarti bahwa variabel *Good Governance* berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Elvira (2011) dan Azlim *et al.*, (2012) yang menemukan bahwa penerapan *good governance* berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah. Penerapan *Good Governance*, menuntut pemerintah untuk dapat memberikan informasi yang didasarkan pada prinsip transparansi, bertanggungjawab, partisipasi, keadilan, kemandirian, mudah dipahami dan sebenarnya (Cadbury Committee, 1992). *Good governance* yang baik menghendaki dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan laporan keuangan yang baik, melalui dari penganggarannya, penggunaannya sampai dengan pelaporannya sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah terhadap dana yang berasal dari masyarakat luas, sehingga akuntabilitas keuangan dapat tercapai.

Laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pemerintah akan akuntabel jika memenuhi semua prinsip *good governance*, dengan pemenuhan dasar-dasar pelaporan keuangan yang merupakan prinsip *good governance* maka pemerintah sebagai pengelola keuangan daerah dengan sendirinya akan meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan dari masyarakat. Terpenuhinya dasar-dasar pelaporan keuangan tersebut juga dapat mencapai kemakmuran dan kemajuan daerah karena sumberdaya daerah akan dikelola untuk tujuan pelayanan masyarakat. Jadi, pemerintah yang telah menerapkan *good governance* maka laporan keuangannya lebih akuntabel.

Pengaruh Audit kinerja Terhadap Akuntabilitas keuangan

Audit kinerja mempunyai tingkat signifikansi terhadap akuntabilitas keuangan, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,014 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel audit kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Hasil

penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Chandra (2013) yang menemukan bahwa audit kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Hubungan dilakukannya audit kinerja terutama dibagian yang langsung terkait dengan penegelolaan keuangan dengan kualitas pelaporan dari laporan keuangan daerah akan sangat besar. Pengaruh tersebut terkait dengan audit kinerja yang minitikberatkan kepada pemeriksaan tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian yang menggambarkan kinerja dari pegawai yang terkait dengan pengelolaan laporan keuangan mulai dari penganggraran, penggunaan, sampai dengan penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban dari pemerintah atas dana masyarakat yang dikelolanya.

Pengaruh Laporan keuangan Terhadap Akuntabilitas keuangan

Laporan keuangan mempunyai berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Laporan keuangan pada pemerintah sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan karena standar yang harus dipenuhi oleh sebuah laporan keuangan adalah relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat diperbandingkan. Selain itu hal yang juga harus diperhatikan dalam penyusunan laporan keuangan adalah mengandung kejujuran artinya informasi yang terdapat pada laporan keuangan pemerintah sebagai pertanggungjawaban pemerintah yang mengelola dana masyarakat berisi informasi yang sebenar-benarnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Berdasarkan uji kelayakan model (Uji F) yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa *Good Governance*, audit kinerja, dan laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. (2) Berdasarkan hasil uji t pada uji regresi linier berganda dapat diketahui (a) Bahwa variabel *Good Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. (b) Bahwa variabel audit kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. (c) Bahwa variabel laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Saran

Saran yang bisa diberikan antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan adalah: (1) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian di luar variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini, misalnya faktor kepuasan kerja yang bisa digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan, mengingat terdapat pengaruh sebesar 29,1% dari variabel lain yang tidak diikut sertakan dalam penelitian ini. (2) Untuk penelitian selanjutnya mempertimbangkan untuk menggunakan objek penelitian yang lebih luas dengan ruang lingkup provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azlim, Darwanis dan U. A. Bakar. 2012. Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. *ISSN 2302 - 0164*, Volume 1, No. 1. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Cadbury Committee. 1992. *Report of The Financial Aspects of Corporate Governance*. Gee. London.
- Chandra dan G. Maestro. 2013. Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Peningkatan Kinerja Keuangan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi*. Universitas Pakuan. Bogor.

- Elvira, Z. N. 2011. Pengaruh Penerapan Good Governance Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan. *Jurnal Akuntansi* Vol. 10(01).
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Edisi Ketiga. Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi Kelima. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Harun, R. M dan Suratno. (2009). *Asesmen Perkembangan Anak Usia Dini*. Multi Pressindo. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- _____. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- _____. Nomor 25 Tahun 1999 tentang tentang Pelayanan Publik.
- _____. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- _____. Nomor 32 Tahun 2004 tentang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- _____. Nomor 33 Tahun 2004 tentang Standar Pemerintahan Daerah.
- _____. Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- _____. Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- _____. Nomor 105 Tahun 2000 tentang tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Sadjiarto, A. 2000. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja pemerintahan. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*. Vol 2(2).
- Sanusi, A. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Schiavo-Campo, S. and Tomasi, D. 1999. *Managing Government Expenditure*. Asia Development Bank. Manila.
- Sinaga, J. 2005. Selamat Datang Standar Akuntansi Pemerintahan. <http://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art8.Pdf>. Diakses tanggal 27 Desember 2017.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Sumodiningrat, G. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Syahrudin, R. 2003. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta. PNRI.
- Wiraputra, W. K., N. K. Sinarwati dan N. T. Herawati. 2014. Pengaruh Pemahaman SAP dan Latar Belakang Pendidikan Terhadap Penyusunan Dan Penyanjian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Program S1*. Volume 2 No. 1 Tahun 2014 hal 1-10. Universitas Pendidikan Ganesha.